



Saber Pungli Target Objek Wisata

Amlapura (Bali Post) -

Membongkar dari yang kecil-kecil. Begitulah kiat Satgas Saber Pungli Karangasem dalam memerangi aksi pungli di Bumi Tanah Aron ini. Yang terbaru, satgas yang dipimpin Waka-polres Kopol A.A. Mudita itu mengarahkan perhatian pada aktivitas di objek-objek wisata. Potensi aksi oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi di tempat-tempat seperti itu dinilai cukup tinggi.

"Sebenarnya semua hal kita

pantau. Target kita objek-objek wisata. Ini bukan hanya menghentikan aktivitas punglinya, tetapi untuk menjaga citra dari objek wisata itu sendiri," tegas Kopol Mudita, Rabu (15/3) kemarin.

Aksi pungli di objek-objek wisata itu dinilai jauh lebih merugikan dibandingkan pungli di tempat lain. Aksi pungli di objek wisata bisa berdampak luas terhadap pembangunan di sektor pariwisata secara umum. Pemerintah tidak hanya akan

dirugikan oleh berkurangnya pendapatan retribusi di objek-objek wisata tersebut. Pungli di tempat pariwisata itu juga bisa berimplikasi kontra produktif, yakni menurunnya tingkat kunjungan ke objek wisata bersangkutan.

Kopol Mudita tak menampik hasil tangkapan satgas yang dipimpinnya sejauh ini terkesan kelas taxi. Hal itu mengacu pada dua kali operasi tangkap tangan (OTT) yang sudah terjadi. Dalam dua kali

OTT tersebut, Satgas Saber Pungli Karangasem mengamankan dua juru parkir di Pasar Amlapura Barat. Selain itu, seorang anak buah kapal (ABK) yang menyewakan kasur di sebuah kapal feri penyeberangan Padangbai-Lombok.

Penglingsir Puri Karangasem ini berharap masyarakat tidak buru-buru apriori terhadap kinerja Satgas Saber Pungli ini. Pengungkapan aksi pungli semestinya tidak hanya dilihat dari sisi kualiti-

tas pelaku maupun barang bukti yang berhasil diamankan. Namun, lebih ditonjolkan efek jera yang ditimbulkannya. Dengan ditangkapnya para pelaku pungli tersebut, diharapkan aksi pungli itu tidak "menyebar" di tempat lain. "Jangan sampai terjadi di tempat-tempat wisata lainnya. Jika sampai terjadi maka bukan pemerintah saja yang rugi, tetapi masyarakat pasti ikut terdampak," ujarnya. (kmb)

Edisi : Kamis, 16 Maret 2017

Hal : 13



Terlibat Kasus Korupsi Dana Hibah DPC Gerindra Usulkan Kicen Adnyana Di-PAW



Bali Post/kmb

Wayan Baru

Semarang (Bali Post) -

Salah satu anggota DPRD Klungkung Wayan Kicen Adnyana telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 200 juta. Atas status itu, DPC Partai Gerindra Klungkung mengambil langkah dan tindakan tegas dengan mengusulkan Pengganti Antar Waktu (PAW) ke DPD Gerindra Bali untuk diteruskan DPP. Hal ini pun diakui Ketua DPC Partai Gerindra, Wayan Baru.

"Sesuai AD/ART Partai Gerindra, siapa pun kader, termasuk saya yang melakukan kesalahan. Apalagi korupsi dana APBD, tidak ada ampun," kata Baru, Selasa (14/3). Menurutnya, surat PAW terhadap Kicen itu telah dikirim ke DPD Gerindra Bali setelah dirinya sehari mendapat surat tembusan dari Kapolres terkait penetapan status tersangka, Kamis (9/3) lalu.

Tak hanya itu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Wayan Baru yang didampingi anggota fraksi DPRD Komang Suantara, AA Sayang Suparta dan Nengah Mudiana juga sudah mengaku berulang kali memanggil Kicen untuk membicarakan kasusnya. Hanya saat itu dirinya belum bisa mengambil keputusan. Keputusan PAW baru diambil setelah Kicen menyandang status tersangka.

Wayan Baru mengaku keputusan ini diambil setelah melakukan koordinasi dengan fraksi dan kader lainnya. Namun, dalam kasus ini, pihaknya akan mengambil sikap tegas dengan mengusulkan PAW. Apalagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto secara tegas mengatakan akan melakukan PAW terhadap kader yang korupsi. "Terakhir saya juga sudah panggil yang bersangkutan (Kicen) saat kunker di Lombok. Beliau mengaku siap menerima dan mengakui kesalahan," ujar Wayan Baru.

Untuk kasus Kicen, Wayan Baru juga menegaskan tidak akan memberikan pendamping hukum. Karena kasus yang melibatkan yang bersangkutan adalah korupsi APBD. Selain itu ia juga telah memecat Kicen sebagai Ketua PAC Gerindra Banjarangkan. Posisinya diusulkan untuk digantikan Putu Bargawa asal Takmung. Begitu pula soal PAW, DPC bakal mengusulkan Wayan Widiana asal Desa Bakas untuk menggantikan posisinya di DPRD Klungkung. Mengingat Nengah Sutera yang berada posisi nomor dua dalam perolehan suara di bawah Kicen telah mengundurkan diri dari Gerindra.

Edisi : Kamis, 16 Maret 2017

Hal : 10



Wayan Baru yang juga sebagai Ketua DPRD Klungkung ini mengatakan kalau selama jadi kader Gerindra, Kicen sangat aktif. Dia pun sangat loyal dengan partai. Hanya saja karena hal ini soal kasus korupsi APBD, pihaknya tidak akan main-main. DPC tetap akan mengusulkan PAW terhadap Kicen meskipun belum ada putusan dari pengadilan soal kasusnya. Bahkan pihaknya meminta Sekwan agar tidak mengikutkan Kicen melakukan kunker jika bertepatan dengan pemanggilan dari Polres Klungkung.

"Mudah-mudahan keputusan dari pusat segera turun agar cepat diproses. Saya juga telah menugaskan bendahara partai untuk memberikan saran. Apakah mau mengundurkan diri atau PAW. Kalau bagi saya mengundurkan diri lebih terhormat," katanya. Di lain pihak rencana penyidik Tipikor Polres Klungkung memeriksa Kicen, Selasa lalu gagal. Lantaran politisi asal Dusun Anjangan, Desa Getakan, Banjarangkan tidak bisa hadir.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Klungkung AA Sayang Suparta mengaku sempat mendapat SMS dari Kicen yang mengatakan kalau dirinya tidak bisa ngantor karena sakit. Namun, AA Sayang tidak mengetahui sakit apa yang dialami Kicen. "Sakit apa saya tidak tahu. Tapi Pak Kicen juga sudah melakukan pemberitahuan tidak bisa memenuhi panggilan di Polres melalui pengacaranya," katanya.

AA Sayang dan Wayan Baru juga mengklarifikasi soal pemanggilan Kicen oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Klungkung. Sebab, sejauh ini tidak ada surat yang masuk ke Ketua DPRD dan Fraksi Gerindra soal pemanggilan kadernya, Kicen Adnyana. "Saya baru tahunya dari media kalau Pak Kicen dipanggil BK. Padahal tidak ada surat soal pemanggilan BK yang masuk ke Ketua DPRD dan Fraksi Gerindra," terangnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Wiastu Andri Parajitno, ketika dikonfirmasi mengakui kalau Kicen tidak bisa datang memenuhi panggilan karena sakit. Surat keterangan sakitnya dikirim melalui pengacaranya. Tapi dengan tidak datangnya Kicen memenuhi panggilan, tidak menghalangi penyidik untuk melakukan pemanggilan ulang. (kmb)

Edisi : Kamis, 16 Maret 2017

Hal : 10